

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2 TAHUN 2023

PUSAT PELATIHAN DAN
PENYULUHAN KP

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Pelatihan (Puslatluh KP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puslatluh KP tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Puslatluh KP tahun 2020-2024, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Puslatluh KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Tahun 2023, Puslatluh KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, keberhasilan/kegagalan program,

permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Puslatluh KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama tahun 2023.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Puslatluh KP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Puslatluh KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 20 Juli 2023

**Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
KP,**



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi dan misi Presiden Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.

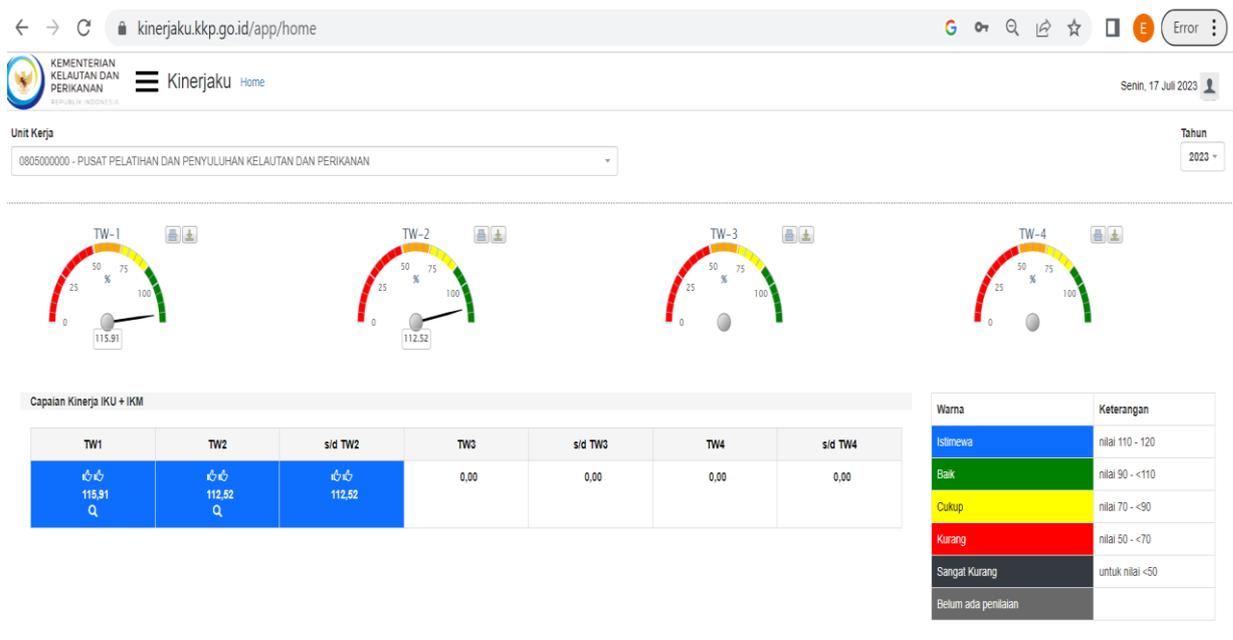
Kementerian Kelautan dan Perikanan siap melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

1. membangun sumber daya manusia (SDM);
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. menghapus kendala regulasi;
4. menyederhanakan birokrasi, dan;
5. melakukan transformasi ekonomi.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mempunyai target PK Revisi bulan Juni Tahun 2023 untuk pelatihan sebanyak 32.224 orang masyarakat yang dilatih, pelatihan aparatur 4.960 orang, sarana pelatihan dan penyuluhan KP 10 unit, prasarana

pelatihan dan penyuluhan KP 5 unit dan 47.000 Kelompok pelaku utama yang disuluh.

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 2 adalah 112,52% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Capaian Penetapan Kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan, sampai triwulan 2 tahun 2023 dengan target prioritas yang telah dicapai sebagai berikut:

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	%	70	0	0	-
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	orang	32.224	11.500	13.231	115,05
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rupiah Miliar	9,77	4,0	4,36	109,00
Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan						
4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi	orang	1890	330	632	120
Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP						
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	137	0	0	-
6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	paket	10	0	0	-
Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP						
7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun	NSPK	9	0	0	-
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	7	0	0	-
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh	Kelompok	47.000	23.500	23.900	101,70
10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya	Kelompok	1.800	180	180	100
11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk	Kelompok	3.000	950	2.033	120
12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	orang	12.342	0	0	-
Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP						
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP	Desa Perikanan Cerdas	6	0	0	-
14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok	24	0	0	-
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	10	0	0	0
16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	5	0	0	0
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih						

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
17	Aparatur KP yang dilatih	orang	4.960	3.000	3.801	120
	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti	Buah	10	10	10	100
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	%	100	50	54	108
20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP	Satker	1	0	0	-
21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Satker	1	0	0	-
22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP	Nilai	92	0	0	-
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP	%	92	92	100	108,70
24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP	%	77	72	78,19	108,60
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022	nilai	0,5	0	0	-
26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP	%	75	75	75	100,00
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	Unit	1	0	0	-
28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP	%	80	0	0	-

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2023 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.656.527.976.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 14.971.385.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 10 Juli 2023 tahun anggaran 2023 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 337.857.486.303,- (51%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 6.928.811.329 (46,28 %).

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran triwulan 2 tahun 2023 capaian kinerja output program belum semuanya tercapai namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu melakukan berbagai hal analisa sebagai berikut:

1. Mensinergikan target pelaku usaha dan kelompok pelaku utama yang disuluh serta dilatih dalam rangka efektifitas dan percepatan capaian kegiatan.
2. IKU Kelompok yang ditingkatkan perlu dimonintoring secara kontinu
3. Verifikasi data dukung yang ribuan perlu di monitoring data dukungnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Tujuan	2
	3. Tugas dan Fungsi	3
	4. Keragaan SDM	4
	5. Sistematika Pelaporan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	1. Rencana Strategis 2020-2024	11
	a. Visi	
	b. Misi	
	c. Tujuan	
	d. Sasaran Strategis	
	e. Potensi dan Permasalahan	
	2. Perjanjian Kinerja	17
	3. Rencana Kerja Tahunan	19
	4. Pengukuran Kinerja	20
	a. Rumus Pengukuran	
	b. Metode Pengukuran	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	1. Prestasi Kinerja	22
	2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
	3. Akuntabilitas Keuangan	60

BAB IV	PENUTUP	65
	1. Capaian Kinerja Utama	65
	2. Rekomendasi dan Permasalahan	68

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BRSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan

dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program riset dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BRSDM KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Puslatluh KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Puslatluh KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP kepada Kepala BRSDM KP selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2023.

- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BRSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP;
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Puslatluh KP.

3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri KP OTK Permen KP No.48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP serta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 2) Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 3) Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

c. Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PUSLATLUH KP



4. Keragaan SDM

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan salah satu unit kerja dari Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu mewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, dengan misi:

- (1) Mengembangkan kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, dan
- (2) Mengembangkan SDM kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Puslatluh KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara, dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Puslatluh KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk mendapatkan diklat;
- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan dan penyuluhan;
- 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan dan penyuluhan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penyuluhan;
- 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
- 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Puslatluh KP melalui kerjasama program pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;

- 8) Memberikan informasi pelatihan dan penyuluhan secara cepat, terkini dan akurat kepada stakeholders;
- 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan teknis dan fungsional;
- 10) Mendorong tersedianya program penyuluhan, dan materi penyuluhan dalam pendampingan kepada pelaku utama/usaha perikanan;
- 11) Memacu standarisasi pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan;
- 12) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional dibidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, mesin perikanan dan manajemen. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik. Jumlah SDM Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan secara keseluruhan dapat dilihat pada infografis berikut:

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah pelatihan yang secara keseluruhan dapat melayani pelatihan di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP

No.	Satuan Kerja	Wilayah Pelatihan (Provinsi)	Keterangan
1.	BPPP Medan	Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung	8 Provinsi, 110 Kabupaten/Kota
2.	BPPP Tegal	Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng	9 Provinsi, 115 Kabupaten/Kota
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel	5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota
4.	BPPP Bitung	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim Kalut	7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota
5.	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra	5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota
6.	BDA Sukamandi	Seluruh Indonesia	34 Provinsi

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

Sedangkan Untuk Keragaan data jumlah Penyuluh Perikanan sebagai pendamping program prioritas KKP Tahun 2023 adalah sebanyak 4.425 orang, terdiri dari: 1). Penyuluh PNS sebanyak 2.295 orang, 2). Penyuluh CPNS sebanyak 199 orang, 3) PPB sebanyak 1.584 orang,) PPPK sebanyak 347 orang. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan memiliki wilayah yang secara keseluruhan dapat di seluruh Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan memiliki wilayah yang secara keseluruhan dapat di seluruh Indonesia.

Satminkal dan Wilayah Kerja Penyuluhan Perikanan Per. Provinsi

No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)	No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)
1.	BPPP Medan	Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau	6.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang	Bangka Belitung Jambi Bengkulu Sumsel Lampung
2.	BPPP Tegal	Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Timur	7.	Balai Riset Perikanan Air Tawar Bogor	Banten DKI Jakarta Jawa Barat
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur Kalimantan Selatan	8.	Balai Riset Perikanan Air Payau Maros	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
4.	BPPP Bitung	Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo			
5.	BPPP Ambon	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat	9.	Balai Besar Riset Perikanan Budiaya Perikanan Air Laut Gondol, Bali	Bali NTB NTT Kalimantan Tengah

PROFIL SATKER LINGKUP PUSLATLUH



5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2023, serta metode Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
6. **Lampiran**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2. Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden

Kementrian Kelautan dan Perikanan siap mendukung dan melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia (SDM);
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Menghapus kendala regulasi;
4. Menyederhanakan birokrasi, dan;
5. Melakukan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada:

1. Peningkatan SDM,
2. Pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP),
3. Peningkatan pengawasan SDKP;
4. Industrialisasi kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan usaha dan investasi;
6. Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan
7. Komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan Pembangunan KKP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Nasional dalam rangka mencapai sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Dengan demikian Kebijakan Puslatluh KP adalah:

- 1) Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;

- 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- 4) Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi teknologi dan pelatihan.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

4. Sasaran Strategis

Secara rinci Puslatluh KP memiliki 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut ditetapkan melalui tahapan-tahapan program berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- Pendampingan Kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

2) CUSTOMERS PERSPECTIVE

- Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

3) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

4) LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

- Tata kelola pemerintahan yang baik
- Terwujudnya birokrasi Puslatluh KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

5. Sasaran Kegiatan

Reviu Renstra terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Nomor SK.311/BRSDM.5/RC.221/V/2021, tanggal 3 Mei 2021. Dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 tahun 2021 tentang Rencana kerja KKP tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP dan usulan pemutahiran lingkup BRSDM KP. Setelah dilakukan review terhadap Renstra Puslatluh KP di Bulan Mei Tahun 2022, masih perlu dilakukan penyesuaian mengingat target akhir berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslatluh KP di Desember Tahun 2022 mengalami perubahan.

- Beberapa indikator yang disesuaikan volume targetnya antara lain:
- a. Perubahan Volume target indikator “Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih” dari 27.370 orang menjadi 27.940 orang akibat adanya penambahan anggaran bersumber dari BLU dan PNBP di beberapa Satker;
 - b. Perubahan Volume target indikator “Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi” dari 359 orang menjadi 608 orang, dikarenakan adanya penambahan anggaran BLU di BPPP Tegal;
 - c. Perubahan Volume target indikator “Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan” dari 37 produk menjadi 20 produk, pasca pengeluaran pagu anggaran terblokir dari DIPA Lingkup Puslatluh KP;
 - d. Perubahan Volume target indikator “Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar” dari 12 unit menjadi 10 unit, setelah adanya pemotongan anggaran yang terblokir di RO Sarana Pelatihan dan penyuluhan KP Terstandar;
 - e. Perubahan Volume target indikator “Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar” dari 5 unit menjadi 2 unit, pasca kebijakan pemotongan anggaran blokir yang ada di Satker;
 - f. Perubahan Volume target indikator “Aparatur KP yang dilatih” dari 4.725 oarng naik 4.855 orang, pasca penambahan pagu PNBP di BDA Sukamandi.

6. Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan

an Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

- a) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
- b) Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
- c) Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP
- d) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
- e) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
- f) Masih rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;

- g) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
 - h) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan
 - i) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
 - j) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
 - k) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
 - b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
 - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
 - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.
- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.
- D. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

- Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang memerlukan pembinaan dan pendampingan;
- Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
- Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- Penyebaran jumlah penyuluh perikanan relatif tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;

7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2023 diatas, Puslatluh KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berbasis Logical framework.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek

Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Nomor SK.311/BRSDM.5/RC.221/V/2021, tanggal 3 Mei 2021. Dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

antara lain dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 tahun 2021 tentang Rencana kerja KKP tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP dan usulan pemutahiran lingkup BRSDM KP. Setelah dilakukan review terhadap Renstra Puslatluh KP di Bulan Mei Tahun 2022, masih perlu dilakukan penyesuaian mengingat target akhir berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslatluh KP di Desember Tahun 2022 mengalami perubahan.

Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Perjanjian Kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 seperti pada Tabel di bawah:

PK Awal Puslatluh KP Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.940
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,597
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1800
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang	3.000

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
			dibentuk (Kelompok)	
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Desa)	6
		14	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk)	9
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	6
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	4
Kegiatan 2. pelatihan Aparatur KP				
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.770
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Pada Bulan Juni 2023 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan menetapkan PK Revisi yang disebabkan adanya penambahan Pagu dan Output kegiatan dengan adanya penambahan Pagu Anggaran PNPB, seperti pada tabel dibawah ini:

PK Revisi bulan Juni 2023

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	3.224
		3	Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1890
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek (Desa)	6
		14	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk)	24
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5
Kegiatan 2. pelatihan Aparatur KP				
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

8. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

Adapun kegiatan prioritas Puslatluh KP termasuk UPT Pelatihan KP dan Satminkal Penyuluhan KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kinerja utama yaitu:

1. Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 31.940 orang dan ada penambahan output di PK Revisi Juni menjadi 32.224 orang, yang difokuskan kepada pelatihan-pelatihan dengan metode blended/campuran dan pelatihan full online/open akses.

Pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Diklat, yaitu: BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, dan BPPP Ambon.

2. Pelatihan Aparatur.

Pelatihan aparatur bagi 4.770 orang dan adanya revisi output menjadi 4.960 orang ASN KKP adalah sebagai upaya KKP untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur KP, dilakukan melalui penyelenggaraan diklat struktural, teknis, fungsional, dan prajabatan yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan metode online/daring/blended menggunakan aplikasi e-milea.

3. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang disuluh

Penyuluhan diberikan kepada 47.000 Kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dengan pengendalian kinerja dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) Satminkal Penyuluh Perikanan, dengan target kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan kelas kelompok pelaku utama/usaha, dan pembentukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi Sektor KP.

9. Pengukuran Kinerja

A. Rumus Pengukuran Kinerja

Kinerja penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan KP sebagai usaha penciptaan SDM KP yang memiliki kompetensi untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan masih memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut antara lain adalah belum terukurnya kinerja pelatihan dan penyuluhan KP. Penyelenggaraan pelatihan KP tidak jarang penyelenggara pelatihan, baik Puslatluh KP dan UPT Pelatihan, maupun P2MKP merasa kecewa karena dinilai tidak memiliki kinerja

yang standar. Mereka menganggap telah terjadi manipulasi data oleh penilai. Bisa saja itu terjadi kalau penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan dilakukan dengan ukuran subyektif. Dengan kata lain terjadi peluang munculnya bias. Di sini, bias merupakan distorsi pengukuran yang tidak akurat. Meskipun pelatihan bagaimana melakukan penilaian kerja dapat mengurangi bias, maka bias sering terjadi ketika penilaian tetap tidak lepas dari unsur emosional para penilai.

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta

membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005).

Selama ini pemanfaatan **Logical Framework Analysis** masih terbatas bertujuan untuk melakukan proses perencanaan proyek yang bersifat partisipatoris dan berorientasi tujuan. Teknik ini memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam suatu rencana/ program untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi. Padahal LFA merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (output) dan dampak program (outcome) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standard.

LFA digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan disain proyek/ program dalam suatu sistematika dan kaitan yang masuk akal, penilaian disain proyek/ program, memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan proyek/ program, monitoring dan evaluasi kemajuan (progress) dan kinerja (performance) program.

LFA juga dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan tehnis, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan tehnis dalam menyelenggarakan suatu program. Logical Framework sebagai kemampuan tehnis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk Perencanaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horizontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu:

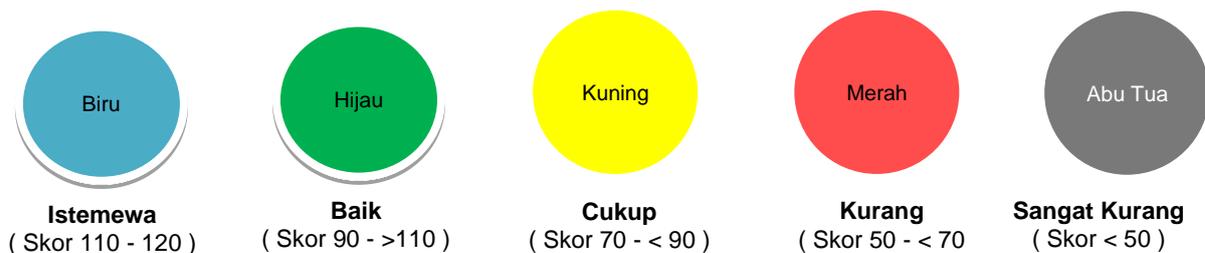
Hubungan antara Goals, Objectives, Outputs dan Activities Logika Vertikal dan Logika Horizontal Indikator Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program Goals dalam kerangka logis (logframe) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi diluar control program. Objectives atau sasaran program merupakan Rincian/ Bagian dari Goal, namun objectives atau sasaran ini selalunya diluar kontrol program. Goal dan Objectives diluar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan Outputs itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program berakhir dan Activities adalah Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh outputs.

Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah Objectively Verifiable Indicators atau disingkat OVI yaitu atau dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realibility and Timely).

B. Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Kepala BRSDM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan triwulanan tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat.

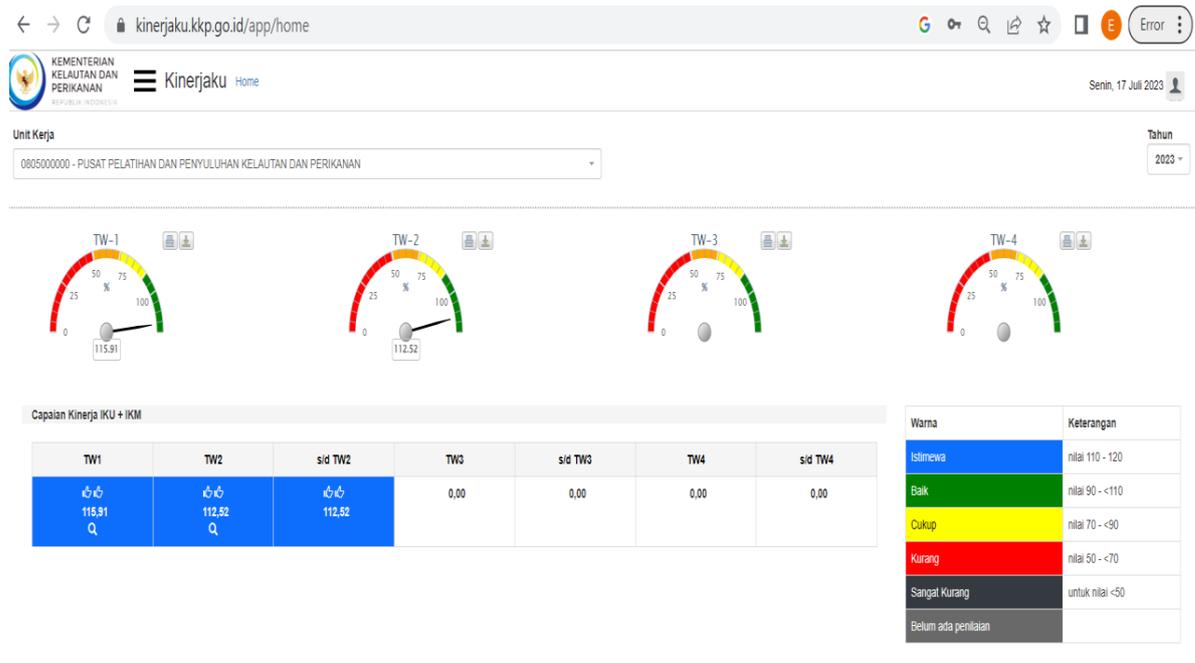
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Prestasi Kinerja Puslatluh KP

A. Nilai Kinerjaaku “BAIK”

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 2 adalah **112,52%** seperti pada tampilan grafik *dashboard* dibawah ini :

Gambar 1. Grafik Nilai Kinerja Puslatluh dan UPT



B. Keberhasilan Tahun 2023

Capaian keberhasilan khususnya untuk tahun 2023 adalah capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Puslatluh KP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian Kinerja Triwulan 2 tahun 2023 pada Puslatluh KP sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	%	70	0	0	-
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	orang	32.224	11.500	13.231	115,05
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rupiah Miliar	9,77	4,0	4,36	109,00
Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan						
4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi	orang	1890	330	632	120
Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP						
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	137	0	0	-
6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	paket	10	0	0	-
Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP						
7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun	NSPK	9	0	0	-
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	7	0	0	-
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh	Kelompok	47.000	23.500	23.900	101,70
10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya	Kelompok	1.800	180	180	100
11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk	Kelompok	3.000	950	2.033	120
12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	orang	12.342	0	0	-
Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP						

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP	Desa Perikanan Cerdas	6	0	0	-
14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok	24	0	0	-
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	10	0	0	0
16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	5	0	0	0
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih						
17	Aparatur KP yang dilatih	orang	4.960	3.000	3.801	120
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti	Buah	10	10	10	100
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	%	100	50	54	108
20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP	Satker	1	0	0	-
21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Satker	1	0	0	-
22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP	Nilai	92	0	0	-
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP	%	92	92	100	108,70
24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP	%	77	72	78,19	108,60
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022	nilai	0,5	0	0	-
26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP	%	75	75	75	100,00
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	Unit	1	0	0	-
28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP	%	80	0	0	-

DATA CAPAIAN PUSLATLUH MENDUKUNG LEVEL 1 TAHUN 2023

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	%	70	0	0	-
2	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rupiah Miliar	9,77	4,0	4,34	4,34
3	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	137	0	0	-
4	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya	Kelompok	1.800	95	180	10,00
5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk	Kelompok	3.000	950	2033	67,77
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	orang	12.342	0	0	-
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP	Desa Perikanan Cerdas	6	0	0	-
8	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	10	0	0	0
9	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	5	0	0	0
10	Aparatur KP yang dilatih	orang	4.960	3000	3801	76,63

Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.01.01

Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

DUDI adalah singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dunia usaha berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan aspek-aspek dan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia industri berkaitan dengan segala pekerjaan untuk merancang, membuat, menghasilkan suatu produk. Pada indikator kinerja ini target jumlah lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri KP pada tahun 2023 sebesar 70 % (31.490 orang) Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan 4, sampai dengan Triwulan 2 Puslatluh telah melatih sebanyak 13.231 orang.

Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.01.02 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

IKU terkait Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kelautan dan perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

IKU Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis APBN;
- 2) Peserta merupakan masyarakat (non ASN);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended (kombinasi online dan tatap muka).

Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKU-2.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)									
Realisasi Triwulan II			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW 2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
3.701	9.278	9.458	32.224	11.500	13.232	115,06	120	58.000	22,81

Pada Tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Selama Tahun 2017-2023 Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang telah dilatih sebanyak 86.110 orang,

Adapun Capain IKU jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP pada triwulan 2 tahun 2023 sebesar 13.231(120). Jika

dibandingkan dengan realisasi Triwulan 2I tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 120 % (139,9%). Capaian triwulan 2 terhadap Renstra Puslatluh 2024 telah sebesar 22,81%.

Adapun sebaran masyarakat KP yang dilatih sebagai berikut ini:

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)

No	Saminkal	Target Tahun 2023	Capaian TW. 2	Persentase
1	BPPP MEDAN	3.200	1.120	35,00
2	BPPP TEGAL	16.590	6.627	39,95
3	BPPP BANYUWANGI	6.250	3.453	55,25
4	BPPP BITUNG	2.980	900	30,20
5	BPPP AMBON	3.204	1.132	35,33
Total		32.224	13.232	41,06

Peningkatan kompetensi masyarakat KP ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknis maupun manajerial di bidang kelautan dan perikanan, seperti penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan, budidaya ikan, dan pengolahan garam. Selain itu kegiatan pelatihan regular teknis seperti BST dan sertifikasi Ankapin/Atkapin juga tetap dilaksanakan dan menjadi kegiatan pelatihan yang juga dapat menghasilkan PNBP untuk masing-masing Balai pelaksanaannya. Beberapa jenis pelatihan yang diadakan oleh Balai tergolong sebagai pelatihan Aspirasi yang merupakan kerjasama antara KKP dengan anggota DPR/DPD asal wilayah/ daerah tertentu. Pelatihan ini secara khusus memberikan dukungan kegiatan pelatihan KP terhadap masyarakat di daerah pemilihan dari anggota DPR/DPD tersebut.

Jika dianalisa lebih lanjut secara umum **penyebab keberhasilan kegiatan pelatihan bagi masyarakat Triwulan 2 Tahun 2023** disebabkan oleh:

- 1) IKU ini dapat tercapai disebabkan antara lain karena adanya terobosan dalam melaksanakan pelatihan yaitu menggunakan sistem pelaksanaan pelatihan on-line.
- 2) Biaya Pelaksanaan Pelatihan sangat murah disebabkan menggunakan metode online.
- 3) Adanya antusias peserta dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan kp.
- 4) Adanya Kerjasama dengan Dinas, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kp.

Sasaran Program SK.01 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.01.02

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. PNBP yang dilakukan oleh Puslatluh KP adalah dengan kegiatan Pelatihan, dan Sarana Prasarana Gedung dan Worskhop.

IKU 2-Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	2,150	9,768	4,340	109,00	101,86		

Pada Tabel diatas bahwa Capaian IKU ini pada Triwulan 2 Tahun 2023 sebesar Rp. 4,356,939,218,-.dari target sebesar 4.000.000.000,- Untuk perbandingan dengan Triwulan 2 tahun 2022 sebesar 2.150.000.000, dengan capaian triwulan 2 Tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 110%.

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Miliar)

No	Level 2	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	374.600.000	121.434.412	32,42
2	BPPP TEGAL	7.191.508.000	2.433.460.753	33,84
3	BPPP BANYUWANGI	565.000.000	466.797.873	82,62
4	BPPP BITUNG	187.865.000	147.302.511	78,41
5	BPPP AMBON	570.349.000	296.187.829	51,93
6	BDA SUKAMANDI	879.000.000	891.755.840	101,45
Total		9.768.322.000	4.356.939.218	63,44

Jika dianalisa lebih lanjut secara umum **penyebab keberhasilan PNBP pada Triwulan 2 Tahun 2023** disebabkan oleh:

- 1) Banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh BPPP dan BDA Sukamandi dengan Pemerintah daerah dan instansi lain;
- 2) Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan dan Penyuluhan dapat di sewakan sebagai pemasukan PNBP;
- 3) Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan PNBP.

Sasaran Program SK.02 Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.02.01 Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi

Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Puslatluh KP melalui Balai Diklat pada tahun 2023 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 1.800 orang, Indikator kinerja utama untuk Sasaran Strategis ini adalah jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 180 orang, yang dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP.

IKU dari sasaran strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah meningkatnya kompetensi SDM KP yang dihasilkan dari proses pelatihan dan penyuluhan KP adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

BRSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approval untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas

kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ini juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

IKU-4.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)									
Realisasi Triwulan II			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW 2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
97	131	403	1.890	330	652	197,58	120	58.000	1,12

Pada Triwulan 2 tahun 2023 Target sebanyak 330 orang dengan realisasi sebesar 652 orang (120%) sedangkan pada tahun 2022 triwulan 2 sebanyak 403 orang.

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang diuji kompetensinya. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi baik purnawidya pelatihan maupun dari dunia usaha, dan dunia industri.

Sehingga selama periode tahun 2017 sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 ini, secara kumulatif Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerja sebesar 19.424 orang yang mengikuti uji kompetensi untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan.

Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)

No	Saminkal	Target	Capaian	Persentase
1	BPPP MEDAN	90	-	0,00
2	BPPP TEGAL	1.440	487	33,82
3	BPPP BANYUWANGI	180	145	80,56
4	BPPP BITUNG	90	-	0,00
5	BPPP AMBON	90	-	0,00
	BDA SUKAMANDI	1.890	632	33,44

Penyebab kegagalan pencapaian IKU pada BPPP Medan, Bitung dan Ambon antara lain adalah:

1. Belum adanya approval assesor pelaksanaan uji kompetensi oleh BNSP yang diwakili oleh LSP KP;
2. Masih adanya revisi Permen KKP no.33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, adapun dalam PermenKKP ini untuk Sertifikat Awak Kapal Perikanan wewenang Dirjen Tangkap KKP pada Pasal 127 ayat 2-4;
3. Belum adanya kerjasama dengan Perusahaan peserta uji kompetensi.

Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan

Indikator Kinerja IKSK.03.01 Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)

Pada indikator kinerja ini Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)(orang) target jumlah lulusan pelatihan yang membentuk start up

(usaha rintisan) pada tahun 2023 sebesar 137 orang. Dan untuk capaian pada IKU ini belum dapat diukur pada Triwulan 2V tahun 2023. Disebabkan IKU ini adalah outcome dampak pelatihan maka proses Purnawidya pelatihan menjadi Start UP minimal 6 bulan dari kegiatan pelatihannya.

Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan

Indikator Kinerja IKSK.03.02 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional.

Untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan kp yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan.

Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa.

Sasaran Program SK.04 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKSK.04.01 Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)

Dalam rangka meningkatkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang profesional agar mampu bersaing dipasar global perlu adanya petunjuk/pedoman untuk para penyelenggara pelatihan yaitu antara lain adanya Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan kerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Untuk mewujudkan pelatihan kerja tersebut, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelatihan yang mengacu kepada kompetensi kerja selanjutnya dikenal sebagai Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training/CBT) yang baru dikembangkan di Indonesia. Beberapa keuntungan pelatihan berbasis kompetensi diantaranya adalah pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, praktis, ada kepastian pengakuan bagi peserta pelatihan dari dunia usaha sebagai

pengguna jasa. pelatihan berbasis kompetensi ini berorientasi dengan dunia kerja, dimana program dan materinya merupakan turunan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait dan disyahkan melalui Keputusan Menakertrans , dengan demikian maka diharapkan lulusan (output) pelatihan ini dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Bagi peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan akan memperoleh pengakuan apabila peserta dinyatakan lulus melalui uji kompetensi yang diselenggarakan setelah tahapan proses pelatihan dapat diselesaikan oleh peserta pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memenuhi akan kebutuhan informasi dan pedoman yang diperlukan oleh lembaga penyelenggara pelatihan, maka perlu disusun Norma, Standar, Pedoman dan Kurikulum Pelatihan dan Penyuluhan.

Sasaran Program SK.04

Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKSK.04.02

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang terstandar di bawah BRSDM yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan dan penyuluhan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standardisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi standardisasi: program,

lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP.

IKU ini menggambarkan mengenai standardisasi sistem manajemen mutu lembaga pelatihan, dimana 6 (enam) lembaga pelatihan di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan SDM KP. Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2023 ini, telah dilakukan audit internal atas akreditasi ISO 9001:2015 yang diperoleh 6 lembaga, yakni Puslatluh KP BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, dan BPPP Ambon, serta BDA Sukamandi pada tahun 2022. Audit adalah audit pemantauan yang wajib dilakukan oleh

badan sertifikasi independen setiap 1 tahun sekali terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO, yang bertujuan untuk menentukan apakah 6 lembaga tersebut masih berhak menandatangani sertifikat ISO 9001:2015 atau tidak.

Capaian IKU ini pada triwulan 2 ini belum ada disebabkan masih proses penilaian intern oleh Tim ISO 9001/2015, , Diharapkan dengan hasil audit yang menyatakan bahwa organisasi masih sesuai dengan persyaratan sistem manajemen, organisasi masih mengimplementasikan kebijakan dan SOP seperti yang sudah ditetapkan, dan secara berkala melalui auditor internal telah melakukan peninjauan dan peningkatan manajemen mutu melalui audit internal dan tinjauan manajemen, serta tindakan perbaikan yang berkelanjutan sesuai sistem manajemen dan monitoring sasaran mutu.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.01 Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)

IKU kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sasaran Strategis dari IKU ini adalah meningkatnya nilai ekonomi KP mendukung terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dimana Puslatluh KP memiliki peran strategis dalam peningkatan nilai ekonomi KP melalui peningkatan kelas kelompok utama/pelaku usaha perikanan.

Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan melalui pendekatan kelompok sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuh kembangkan dan meingkatkan kelas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan , maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350. 2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650. 3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

IKU-5.Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)									
Realisasi TW 2			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022			Target 2023	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan TW 2 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022	1.800	180	180	100	33,34	1.500	12,00
585	118	135							

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 1.800 orang untuk Tahun 2023, dengan capaian Triwulan 2 Tahun 2023 sebesar 180 kelompok dan perbandingan dari triwulan 2 tahun 2022 sebelumnya sebesar 1 kelompok.

Adapun perbandingan Triwulan 2 Tahun 2023 dan Tahun 2022 ada kenaikan sebesar 120% hal ini disebabkan IKU ini termasuk IKU termasuk yang dipantau dalam kegiatan Prioritas KKP.

No	Saminkal	Target Tahun 2023	Capaian TW 2	%
1	BPPP Medan	235	10	4,26
2	BPPP Tegal	240	11	4,58
3	BPPP Banyuwangi	270	64	23,70
4	BPPP Bitung	90	5	5,56
5	BPPP Ambon	75	22	29,33
6	BRPPUPP Palembang	250	18	7,20
7	BRPBATPP Bogor	120	14	11,67
8	BBRBLPP Gondol	230	20	8,70
9	BRPBAPPP Maros	290	16	5,52
	Total	1800	180	100,51

Penyebab Keberhasilan IKU ini dikarenakan:

1. Proses penilaian kelas kelompok mulai dari SK Kepala Dinas, Proses Penilaian ke Kelompok, Rapat Penilaian, Sampai Sertifikat Kelompok diterbitkan oleh Camat, telah dilaksanakan pada awal tahun.
2. SK Penetapannya sudah keluar disebabkan masih adanya verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah dipercepat.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.02

Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh

IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.000 orang, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU-5.Kelompok kelautan dan perikanan yang di suluh (kelompok)									
Realisasi TW 2			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022			Target 2023	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022	47.000	23.500	23.900	101,70	-8,10166494	45.000	53,11

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.000 orang berbeda dengan tahun 2022 yang sebesar 45.000 kelompok. Adapun capaian tahun 2023 pada triwulan 2 sebesar 23.900 kelompok dengan target 23.500 kelompok sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 26.007 kelompok atau terjadi penurunan 12%.

Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)

No	Saminkal	Target Tahun 2023	Capaian TW 2	%
1	BPPP MEDAN	6.200	3.120	50,32
2	BPPP TEGAL	6.400	3.220	50,31
3	BPPP BANYUWANGI	6.100	2.577	42,25
4	BPPP BITUNG	3.450	996	28,87
5	BPPP AMBON	2.750	1.400	50,91
6	BRPPUPP Palembang	5.600	1.913	34,16
7	BRPBATPP Bogor	3.800	1.650	43,42
8	BBRBLPP Gondol	5.200	3.025	58,17
9	BRPBAPPP Maros	7.500	6.000	80,00
	Total	47.000	23.900	48,71

Penyebab keberhasilan IKU ini pada capaian Triwulan 2 tahun 2023 adalah :

- 1) Adanya SKP bagi setiap Penyuluh sehingga wajib menyuluh ke kelompok binaannya
- 2) Adanya Sanksi bagi Penyuluh yang tidak tercapaian nilai SKP nya
- 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP lainnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya database penyelenggaraan penyuluhan melalui SIMLUH KP dari aplikasi sistem pelaporan online penyuluh perikanan yang dilaporkan oleh penyuluh dalam melaporkan capaian kinerja dalam pendampingan kelompok.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.05.03 kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)

IKU terkait Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Sasaran Strategis dari IKU ini adalah mempersiapkan calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan.

IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk diukur dengan menghitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk / ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU-4. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)									
Realisasi Triwulan 2			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target Tw 2	Realisasi 2	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
810	1.130	260	3.000	950	2.033	120	120	2.000	101,65

Capaian pada tahun 2022 sebesar 260 kelompok dan capaian pada triwulan 2 tahun 2023 sebesar 2.033 kelompok dari target tahun 2023 sebesar 3.000 kelompok sedangkan untuk Target Triwulan 2 sebesar 950 kelompok. Perbandingan capaian triwulan 2 tahun 2022 dan tahun 2023

ada peningkatan sebesar 120% hal ini disebabkan adanya arahan dari BRSDMKP untuk mempercepat proses penilaian penumbuhan kelompok.

No	Saminkal	Target Tahun 2023	Capaian TW 2	%
1	BPPP MEDAN	434	331	76,267
2	BPPP TEGAL	413	143	34,625
3	BPPP BANYUWANGI	434	370	85,253
4	BPPP BITUNG	301	105	34,884
5	BPPP AMBON	215	110	51,163
6	BRPPUPP Palembang	306	301	98,366
7	BRPBATPP Bogor	268	179	66,791
8	BBRBLPP Gondol	307	178	57,980
9	BRPBAPPP Maros	322	316	98,137
Total		3.000	2.033	67,05

Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan:

- 1) Satminkal memberikan arahan mempercepat proses pendataan dan verifikasi penumbuhan kelompok kepada Penyuluh dan Instansi terkait
- 2) Bulan April-Juni 2023 penyuluh berkoodinasi dengan pemerintah daerah melaksanakan pendataan dan verifikasi penilaian pelaku usaha atau pelaku utama yang menjadi kelompok baru.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.04 Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

IKU Tenaga Kerja yang terlibat lingkup Puslatluh KP adalah Tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari data Jumlah PPB, Jumlah PPS, Jumlah Pengelola UMKM, dan Jumlah P2MKP dengan target tahun 2023 sebesar 12.342 orang, Pengukuran IKU ini dilakukan secara Tahunan. Adapun progres capaian

sampai dengan Triwulan 2 sebanyak 1.215 orang yang diambil dari database Penyuluh Perikanan Bantu.

Sasaran Program SK.06 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.06.01 Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Paket)

Penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Faktanya sampai saat ini khususnya kegiatan hilirisasi teknologi kepada pengguna masih belum optimal. Untuk itu, dibutuhkan kegiatan hilirisasi Iptek untuk mengubah perilaku serta pemanfaatan inovasi teknologi oleh masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk. Ditambah lagi hasil riset yang dihasilkan harus bisa disampaikan dan diterapkan oleh masyarakat. Beberapa jenis kegiatan riset yang dilakukan, mulai dari kegiatan yang bersifat responsif, antisipatif, hingga yang bersifat rekomendasi. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan hasil riset perlu suatu kegiatan diseminasi yang dapat secara luas berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja BRSDMKP memberikan solusi untuk menerobos tantangan tersebut dengan mengkolaborasi kegiatan riset dan SDM melalui program Desa Inovasi. Program ini mendorong pemangku kepentingan desa untuk membangun budaya inovasi berbasis kelautan dan perikanan dalam mengelola sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi bersandar sebatas eksploitasi sumberdaya, tapi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya berbasis iptek. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program, hasil karya para peneliti BRSDMKP akan diramu oleh instruktur, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan stakeholder terkait agar dapat mudah diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Di

dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan hilirasi paket teknologi dalam rangka mengintroduksi paket teknologi kelautan dan perikanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Desa Inovasi dilakukan secara partisipatif antar Satuan Kerja lingkup BRSDMKP, eselon I lingkup KKP, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat dengan harapan teknologi-teknologi hasil riset BRSDMKP tepat guna sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta petambak garam. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 6 Desa Inovasi sedangkan untuk realisasinya adalah tahunan.

Sasaran yang diharapkan dari program Desa Inovasi riset dan SDM kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya Iptek untuk kebutuhan masyarakat (desa)
2. Termanfaatkannya Iptek untuk meningkatkan produktifitas masyarakat (desa)
3. Terjalinnnya interaksi antara dunia Iptek (R&D) dengan dunia usaha/bisnis di masyarakat (desa)
4. Terwujudnya produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas

Keluaran yang diharapkan dari program Desa Inovasi riset dan SDM kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

1. Terdiseminasikannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset BRSDMKP kepada *stakeholder* di desa.
2. Memberikan masukan penetapan kebijakan riset dan SDM dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna.
3. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat KP

Pada IKU ini Capaian Keluaran Desa Inovasi/Desa Mitra pada triwulan 2 tahun 2023 belum ada capaiannya , sama seperti pada triwulan 2 tahun 2022, disebabkan masih adanya progres pelaksanaan kegiatan sekitar 50%.

Sasaran Program SK.06 **Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP**

Indikator Kinerja IKS.06.02 **Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan**

IKU ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan dan perikanan tepat guna. Penghitungan dilakukan mengidentifikasi jumlah percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan 2V tahun sudah selesai kegiatan lokasi unit percontohan penyuluhan KP dan untuk progress capaiannya mencapai 100%. Berikut adalah sebaran Lokasi percontohan penyuluhan dan komoditasnya di 9 Balai/Satminkal untuk 2023.

Target pada IKU ini sebesar 22 unit percontohan pada tahun 2023. Pada IKU ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 , Capaian pada tahun 2022 dan Capaian Tahun 2023 pada Triwulan 2 masih 0.

Sasaran Program SK.07 **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja IKS.07.01 **Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)**

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara

menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif. Capaian pengukurannya Tahunan.

Sasaran Program SK.07 **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja IKSK.07.02

Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Untuk Tahun 2023 IKU ini ada dilokasi BPPP Ambon , BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Bitung, BDA Sukamandi dan BPPP Tegal.Saat ini masih proses pekerjaanya oleh pihak ketiga. Capaian pengukurannya Tahunan.

Indikator Kinerja IKSK.08.01

Aparatur KP yang dilatih (orang)

IKU untuk Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi, maupun oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan memiliki peran strategis dalam

pencapaian IKU tersebut. Peningkatan kompetensi ASN KP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 4.950 Pegawai ASN KP mengikuti pelatihan, baik pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, seperti Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial.

IKU-23. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Orang)									
Realisasi TW II			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022			Target 2023	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022	5.195	3.000	3.801	120,00	120	5.000	76,02

Perbandingan Triwuln 2 tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah berbeda jauh capaiannya yaotu pada Triwulan 2 tahun 2022 sebesar 1.720 orang sedangkan pada triwulan 2 tahun 2023 sebesar 3.801 orang ASN KKP. Perbandingan dengan capaian triwulan 2 tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan mulai awal tahun dan adanya penilaian IP ASN KKP di Triwulan 2 tahun 2023.

Aparatur KP yang dilatih (Kelompok)

No.	KEGIATAN	Target	Realisasi Tw 2	%-ase
1	Aparatur KP yang dilatih dengan metode Blended (orang)	760	598	78,68%
2	Aparatur KP yang dilatih dengan metode Full online (orang)	4.200	3.203	76,26%
Total		4.960	3.801	76,63%

Capaian positif IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pelatihan melalui aplikasi aplikasi e-milea sehingga bisa online ke semua ASn KKP
2. Eselon I Teknis pada awal tahun sudah berkoordinasi dengan BDA Sukamandi mengenai Diklat Teknis yang akan dilaksanakan
3. Tersedianya sarana pokok dan penunjang penyelenggaraan diklat,
4. Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat ToT sesuai bidang diklat yang dilatihkan, dan tersedianya perangkat kurikulum dan modul pelatihan, serta telah terakreditasinya program diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, serta diklat prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.01

Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan maupun UPT Pelatihan dan Penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati terkait kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah ditandatangani.

IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Puslatluh KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan, dan

sebagai upaya lanjutan dari output yang telah dihasilkan untuk menjadi input pada proses selanjutnya.

IKU-18. Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (MOU)									
Realisasi TW 2			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022			Target 2023	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan TW 2 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1	11	7	10	10	10	100,00	42,857	90	11,11

Pada triwulan 2 tahun 2023 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Puslatluh KP sudah ada capaian 10 MOU pada Triwulan 2 dari Target triwulan 2 tahun 2023 sebesar 10 MOU.

Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)

No	KERJASAMA	Judul Kerjasama	Nomor perjanjian kerjasama	JANGKA WAKTU	
				MULAI	BERAKHIR
1	BPPP Tegal - PT. NEW COMER	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	7/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	24 Januari 2023	24 Januari 2026
2	BPPP Tegal - CV. Local Maritim	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	2/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	24 Januari 2023	24 Januari 2026
3	BPPP Tegal - Jangkar Karat Maritim Center	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	13/BRSDM/KKP/PKS/III/2023	21 Maret 2023	21 Maret 2026
4	BPPP Tegal - SMK Yamipura	PELATIHAN, PEMAGANGAN SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA	9/BRSDM/KKP/PKS/III/2023	20 Maret 2023	20 Maret 2026
5	BPPP Tegal SMK - Muhammdiyah Tuban	PELATIHAN, PEMAGANGAN, SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA/I	21/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023	5 April 2023	5 April 2026

6	BPPP Tegal - SMK SUPM Al Maarif	Pelatihan, Pemagangan serta Sertifikasi Guru dan Siswa	25/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023	5 April 2023	5 April 2026
7	BPPP Banyuwangi - SMKN 1 Watulimo Trenggalek	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14/ BRSDM / KKP/ PKS/ II /2023	5 Februari 2023	5 Februari 2026
8	BPPP Banyuwangi - Universitas Hang Tuah Surabaya	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	22/BRSDM/KKP/PKS/V/2023	22 Mei 2023	22 Mei 2026
9	BPPP Banyuwangi - DKP Kutai Kartanegara	PELATIHAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PELAKU UTAMA PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	27/BRSDM/KKP/PKS/V/2023	22 Mei 2023	22 Mei 2026
10	BPPP Tegal - PT Sirip Biru Nusantara	PEMANFAATAN ASET TANAH DAN GEDUNG BANGUNAN SERTA ASET	23/BRSDM/KKP/PKS/VI/2023	7 Juni 2023	7 Juni 2028

Capaian positif IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Kerjasama dengan Intansi terkait lainnya, Pemerintah daerah dan NGO pada awal tahun ;
2. Pemenuhan SDM Tenaga Pelatih;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.02

Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru. Definisinya adalah Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan.

IKU-19. Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)									
Realisasi TW 2 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan TW 2 2022- 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	56,52	48,97	100	50	54	108,00	10,27	90	60,00

Pada tabel diatas dapat dijabarkan untuk bukti capaian diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker. Pada tahun 2023 triwulan 2 ini capaiannya sebesar 108% dari target Triwulan 2 sebesar 50%.

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)

No	JENIS LAYANAN	Jumlah	Target Tw 2	Realisasi dokumen
1	Laporan Rapat Koordinasi Puslatluh	2	1	1
2	Laporan Renja dan Renstra	3	2	2
3	Laporan Rumusan pelatihan dan penyuluhan	4	2	2
4	Laporan Realisasi anggaran dan RKAKL	12	5	2
5	Laporan SPIP dan MR	4	3	7
6	Laporan PIPK	1		
7	Laporan BMN (Pengajuan Lelang dan Penghapusan)	2	2	4
8	Laporan Bulanan	12	6	6
9	Wekly Report	48	24	24
10	Laporan Tahunan 2022	1	1	1
11	Laporan Program dan Kegiatan LKJ	4	2	2
12	Laporan LHE SAKIP dan WBK	1	1	2
14	Laporan Simlat	4	1	1
16	Laporan Evaluasi Desa Inovasi	1		
		99	50	54

Faktor Keberhasilan kegiatan ini yaitu:

1. Adanya SKP Pegawai yang membutuhkan data dukung dalam penilaian SKP Pegawai
2. Komitmen Pimpinan

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.03

Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam

penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Kegiatan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Tahunnya dilaksanakan dan untuk Tahun 2023 satker **BPPP Ambon dan BPPP Bitung** sebagai satker yang akan dinilai.

IKU yang ditetapkan pada PK Tahun 2023 menggunakan metode pengukuran tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya juga sama untuk capaiannya belum ada.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.04

Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam

penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Kegiatan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Tahunnya dilaksanakan dan untuk Tahun 2023 **satker BPPP Bitung dan BPPP Ambon** sebagai satker yang dilakukan pendampingan dan diusulkan.

IKU yang di tetapkan pada PK Tahun 2023 menggunakan metode pengukuran Tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya juga sama untuk capaiannya belum ada.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.05

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP

IKU ini Nilai rekonsiliasi kinerja Puslatluh KP merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKU Ini di tetapkan pada PK Tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan IKU Tahun sebelumnya dengan realisasinya belum ada dan untuk capaiannya baru bisa dilihat pada Triwulan 4 Tahun 2023.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.06

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP

Indikator Kinerja Utama ini Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar belum mencapai target 92% capaian yang dicapai hanya mendapatkan 100% untuk Puslatluh KP dan dari target Triwulan 2 tahun 2023 dengan upaya yg dilakukan adalah mewajibkan semua pegawai input berita ke dalam aplikasi bitrix24kcp, Hasil penilaian nilai manajemen pengetahuan secara rinci per komponen pengukuran adalah sebagai berikut:

IKU-16. Presentase Unit Kerja lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)									
Realisasi TW 2 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan TW 2 2022- 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
100	100	100	92	92	100	108,70	0	90	111,11

Capaian Indikator Manajemen Pengetahuan Triwulan Tahun 2023

PENGHITUNGAN PENERAPAN IKU MP TRIWULAN 2 PUSLATLUH KP							
DOKUMEN				KEAKTIFAN			
Dokumen	Capaian	Target	%	Level	Capaian (Aktif)	Target (Aktif)	%
Perjanjian Kinerja	1	1	100,00%	Level 2	6	6	100,00%
Manual IKU	1	1	100,00%	Level 3	24	24	100,00%
Rencana Aksi	1	1	100,00%	Level 4	48	48	100,00%
Laporan Kinerja	1	1	100,00%				
		Rata-rata	100,00%		Rata-rata		100,00%
TARGET				PENILAIAN			
			92,00%	Komponen	Nilai	Bobot	%
				Dokumen	100,00%	20%	20,00%
				Keaktifan	100,00%	80%	80,00%
				Presentase Capaian			100,00%

Perbandingan dengan IKU tahun sebelumnya yaitu untuk triwulan 2 yaitu sebesar 100%.Permasalahan pada IKU ini disebabkan sebagai berikut:

1. Adanya kekosongan jabatan pada eselon III sehingga harus membuat akun baru pengganti jabatan sementara (Plt) pada aplikasi bitrix24kkp
2. Ada Revisi PK Puslatluh dan UPT
3. Input data ke dalam aplikasi bitrix24 kkp harus memuat unsur 5W1H

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.07 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP terdiri dari indeks kualifikasi Pendidikan ASN, indeks kompetensi ASN, indeks kinerja ASN, dan indeks disiplin ASN KKP. Capaian IKU ini belum dilakukan pengukuran oleh Eselon I KKP pada triwulan 2 tahun 2023. Capaian IKU ini sebesar 78,19.

Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)

No	Komponen	Bobot	Indeks Profesionalitas (IP)	Prosentase (%)
1	Kualifikasi	25,00	16,32	65,28
2	Kompetensi	40,00	31,99	79,97
3	Kinerja	30,00	25,29	84,30
4	Disiplin	5,00	4,59	91,80

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Semester I	Persentase Capaian Semester I (%)
1	Puslatluh KP	77	78,19	108,59

Faktor Keberhasilan IKU ini adalah : adanya IKU IP ASN yang mewajibkan semua Pegawai lingkup KKP untuk aktif dalam kegiatan Pelatihan, Seminar, Workshop serta nilai SKP pegawai tersebut.

Upaya yang telah dilakukan adalah adanya aplikasi e-milea di BDA Sukamandi sebagai wadah pelatihan dengan online bagi semua pegawai ASN KKP yang berminat mendaftar dan mengikuti kegiatan pelatihan .

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.08

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2023

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari pada itu, penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen. Pada tahun 2023, dari target IKU sebesar <1%, untuk capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP belum ada.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.09

Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen. Pada tahun 2023, dari target IKU sebesar 75%, untuk capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 75%.

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)

No	Level 2	Rekomendasi	TL	%
1	Puslatluh KP	75	75	100,00
Total		75	75	100,00

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Puslatluh KP	70	100,00

Faktor Keberhasilan IKU ini adalah : adanya komitmen manajemen Puslatluh dalam mengelola administrasi keuangan secara good government dengan pembukuan laporan keuangan yang rapih.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.10

Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results).

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah d.h.i KKP dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup BRSDMKP Tahun 2023 tersebut bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB Tahun 2023 lingkup BRSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BRSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 26 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB KKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup KKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker terkait, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB. Dalam rangka PMPRB tersebut, Inspektorat Jenderal KKP perlu menilai kesesuaian pemenuhan dokumen dengan matriks penilaian mandiri (self assessment).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup KKP Tahun 2023 bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB TA 2023 lingkup BRSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BRSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 30 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB BRSDMKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup BRSDMKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB

sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker lingkup BRSDMKP, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB.

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023 yaitu **BPPP Ambon** yang pengukurannya Tahunan, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari Penilaian LHE PMPRB .

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.11 Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023, dan pengukuran capainnya menggunakan Tahunan.

Sebagaimana kita ketahui Bersama, berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP (saat ini Permen KP dimaksud dalam proses reviu), tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah

dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implemementasi di BRSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BRSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BRSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja.

Sebagai informasi nilai SAKIP BRSDM KP Tahun 2023 adalah pengukurannya metode tahunan walau sudah ada penilaian mandiri lingkup BRSDM KP dengan Nilai 81,80 dan Uji Petik oleh Itjen KKP yang masih dalam proses finalisasi.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2023 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.656.527.976.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 14.971.385.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 10 Juli 2023 tahun anggaran 2023 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 337.857.486.303,- (51%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 6.928.811.329 (46,28 %).

NO	UPT PUSLATLUH	JUMLAH		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%-ase
1	Puslatluh	14.971.385.000	6.928.811.329	46,28%
2	BDA Sukamandi	13.095.786.000	6.295.859.324	48,08%
3	BPPP MEDAN	76.373.742.000	39.461.300.474	51,67%
4	BPPP TEGAL	100.573.214.000	45.063.645.175	44,81%
5	BPPP BANYUWANGI	91.228.208.000	45.208.585.881	49,56%

6	BPPP BITUNG	56.972.073.000	28.756.003.695	50,47%
7	BPPP AMBON	63.133.607.000	28.872.482.056	45,73%
8	BRPPUPP Palembang	65.066.354.000	35.463.054.568	54,50%
9	BRPBATPP Bogor	34.212.757.000	19.197.415.905	56,11%
10	BBRBLPP Gondol	59.909.454.000	31.421.043.835	52,45%
11	BRPBAPPP Maros	86.910.605.000	51.189.284.061	58,90%
TOTAL		662.447.185.000	337.857.486.303	51,00%

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dimana kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan gabungan dari kinerja satuan pelatihan dan penyuluhan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pelatihan dan penyuluhan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per sasaran strategis bidang pelatihan dan penyuluhan KP Tahun 2023: Secara umum kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

- a) Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
- b) Anggaran yang masih bergerak dinamis dimana prioritas pelaksanaan kegiatan masih terfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid 19 yang masih berlangsung di tahun 2023 ini;
- c) Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan

4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA PUSLATLUH KP

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada Puslatluh KP yaitu;

1. Perencanaan

Efisiensi anggaran dilakukan PuslatluhKP dalam beberapa dimensi, yaitu:

Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 Puslatluh KP telah menetapkan kegiatan prioritas, yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai.

Dimensi efisiensi ketiga berupa penyederhanaan nomenklatur lingkup organisasi. Puslatluh KP merupakan gabungan 2 (dua) eselon II yang tentunya berdampak pada penyederhanaan nomenklatur, penguatan tugas dan fungsi, serta berpengaruh nyata pada pemangkasan jumlah kegiatan dengan tujuan penghematan atas uang yang banyak beredar mengikuti jumlah dan fungsi.

Dimensi efisiensi keempat berupa refofusing anggaran pada pemangkasan alokasi anggaran belanja modal, perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Dukungan Puslatluh KP dalam pencapaian upaya dimaksud dengan melakukan reuiu penganggaran secara berjenjang yang melibatkan *stakeholder* meliputi reuiu anggaran tingkat Puslatluh KP, reuiu anggaran tingkat KKP (Itjen dan Setjen), dan reuiu K/L (DJA dan Bappenas).

2. Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan serapan anggaran terutama untuk perjalanan dinas

- Sinergitas pelaksanaan kegiatan antar satker dan pusat dalam satu rangkaian
- Mengutamakan pertemuan di ruang rapat internal atau satker-satker Puslatluh KP
- Sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui *video conference* dan *live streaming*

- Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan atasan berbasis *Balance Score Card* dan SKP.
- Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- Mengadakan Pelatihan masyarakat dan aparatur dengan via Daring/online sehingga menghemat anggaran.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E-Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, Simlat, e-pelaporan, serta Dashboard dan *Weekly Report* BRSDM
- Melaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan Puslatluh Kp dengan virtual. Hal tersebut memangkas perjalanan dinas dan pertemuan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan
- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

Permasalahan

1. Banyak Realisasi Data Capain kinerja yang melebihi target yang ditetapkan sedangkan realisasi keuangannya tidak sampai 100%, sehingga menjadi analisa bahwa kegiatan tersebut tidak membutuhkan biaya yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan anggaran sebagian satker masih belum **tertib administrasi**.

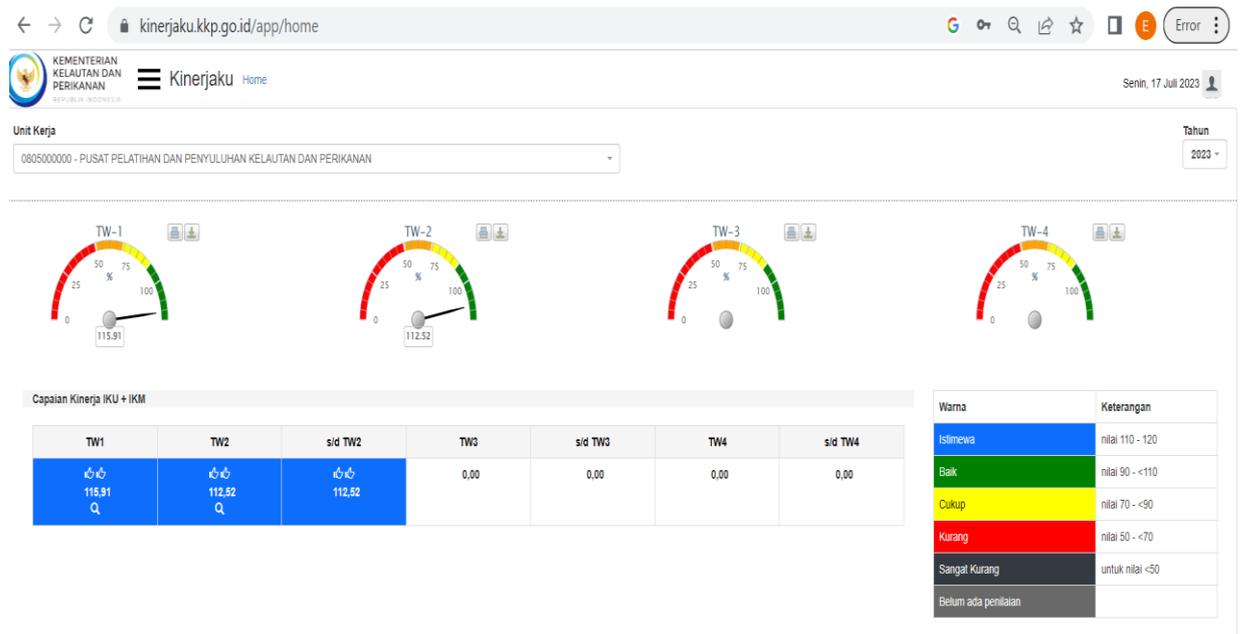
Rekomendasi :

- a. Menyiapkan kapasitas SDM pengelola keuangan untuk merespon berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN yang dinamis;
- b. Melaksanakan pengawalan kepatuhan dalam pengelolaan UP/TUP, dan meningkatkan efisiensi penggunaan belanja operasional seperti perjalanan dinas, dan rapat-rapat di luar kantor

BAB IV PENUTUP

1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 2 Tahun 2023 adalah 112,52% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	%	70	0	0	-
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	orang	32.224	11.500	13.231	115,05
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rupiah Miliar	9,77	4,0	4,36	109,00
Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan						
4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi	orang	1890	330	632	120
Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP						
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	137	0	0	-
6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	paket	10	0	0	-
Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP						
7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun	NSPK	9	0	0	-
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	7	0	0	-
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh	Kelompok	47.000	23.500	23.900	101,70
10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya	Kelompok	1.800	180	180	100
11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk	Kelompok	3.000	950	2.033	120
12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	orang	12.342	0	0	-
Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP						
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP Lingkup Puslatluh KP	Desa Perikanan Cerdas	6	0	0	-
14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok	24	0	0	-
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	10	0	0	0
16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	5	0	0	0
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih						
17	Aparatur KP yang dilatih	orang	4.960	3.000	3.801	120
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti	Buah	10	10	10	100
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	%	100	50	54	108
20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim	Satker	1	0	0	-

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target TW 2	Capaian TW 2	% Capaian
	Penilai Internal KKP					
21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Satker	1	0	0	-
22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP	Nilai	92	0	0	-
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP	%	92	92	100	108,70
24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP	%	77	72	78,19	108,60
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022	nilai	0,5	0	0	-
26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP	%	75	75	75	100,00
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	Unit	1	0	0	-
28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP	%	80	0	0	-

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja untuk tahun 2023 ini Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dengan rekomendasi sebagai alternatif solusi demi tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan sampai dengan Triwulan 2 tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu Masih adanya data dukung yang belum lengkap data dukung nya.

Rekomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Puslatluh pada Triwulan mendatang, yaitu:

1. Mengadakan Pertemuan dengan Satker lingkup Puslatluh segera mungkin;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas KKP dan Nasional.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radlarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia


I Nyoman Radlarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.490
		3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.800
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	6
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	22

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	6
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	4
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (Kelompok)	4.770
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejarang dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 128.466.010.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.000.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 525.061.966.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 656.527.976.000

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia

I Nyoman Radiarta

Jakarta, 9 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Lilly Aprilya Pregiwati



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMIAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Juni 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	32.224
		3	Nilai PNBPS Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
56	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
7	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/cawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	6
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	24

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
B	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10
		16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5
9	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960
10	Terpecahinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diwalkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (Indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA, 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 130.247.884.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.621.087.000
3	Kegiatan Dukung Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 528.578.214.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 662.447.185.000

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia

I Nyoman Radiarta

Jakarta, 29 Juni 2023
Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Lilly Aprilya Pregiwati